

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan dalam Organisasi Pemerintahan

Menurut Zimmerman (1977) *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut *principles* karena menggantikan peran rakyat, namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, *principles* baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai *principles* juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Moe (1984) mengemukakan bahwa hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi. Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan. Fadzil dan Nyoto (2011) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan prinsipal-agen antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

APBD menurut UU Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah, 2006). Menurut Fadzil dan Harry (2011), hubungan keagenan menimbulkan asimetri informasi yang menimbulkan beberapa perilaku seperti oportunistik, *moral hazard*, dan *adverse selection*. Perilaku oportunistik dalam proses penganggaran contohnya, (1) anggaran memasukkan program yang berorientasi publik tetapi sebenarnya mengandung kepentingan pemerintah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek mereka dan (2) alokasi program ke dalam anggaran yang membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik terutama menjelang proses pemilihan, yaitu program yang menarik bagi pemilih dan publik dapat berpartisipasi di dalamnya.

## **2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung-jawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan

DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2006).

Menurut LAN dalam Akuntabilitas dan Good Governance (2000), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah.

Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkungannya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Halim, 2007).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada public secara terbuka dan jujur.

### **3. Penyajian Laporan Keuangan Sektor Publik**

Laporan keuangan sektor public merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor public merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan

menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan**

→ Menurut Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan adalah: 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan, 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan, 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

## 5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Bastian (2006), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: 1) relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi kebutuhan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, 2) Andal yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, 3) Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya, 4) Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan.

## 6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini:

- a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya

bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

- b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

## B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.  
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil
1	Liestiani	2008	<p><b>Variabel independen:</b> Kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, kompleksitas pemerintahan, jumlah temuan pemeriksaan, dan tingkat penyimpangan.</p> <p><b>Variabel dependen:</b> Tingkat pengungkapan pemerintah kabupaten/kota</p>	<p>Variabel kekayaan daerah, kompleksitas pemerintah, jumlah temuan, dan tingkat penyimpangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan tingkat ketergantungan dan karakteristik daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan pemerintah kabupaten/kota.</p>

No	Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil
2	Lesmana	2010	<p><b>Variabel independen:</b> Ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, umur Pemerintah Daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah, dan rasio kemandirian daerah.</p> <p><b>Variabel dependen:</b> Pengungkapan wajib LKPD.</p>	Umur pemerintah daerah dan rasio kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib LKPD. Sedangkan ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer dan jumlah satuan kerja perangkat daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib LKPD.
3	Darmastuti dan Setyaningrum	2011	<p><b>Variabel independen:</b> Lingkungan Internal, Kapasitas Fiskal, Legislature Size, Diferensiasi Fungsional, Spesialisasi Pekerjaan, Ukuran Pemerintah, Daerah Umur Administratif Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Pembiayaan Utang, Intergovernmental Revenue.</p> <p><b>Variabel dependen:</b> Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2009</p>	Pembiayaan utang dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Sedangkan variabel lainnya tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial.
4	Hilmi dan Martani	2011	<p><b>Variabel independen:</b> Tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total asset, jumlah penduduk, jumlah SKPD, tingkat penyimpangan dan jumlah temuan.</p> <p><b>Variabel dependen:</b> Tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah provinsi</p>	Kekayaan daerah, jumlah penduduk dan tingkat penyimpangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah provinsi. Sedangkan tingkat ketergantungan, total asset, jumlah SKPD dan jumlah temuan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah provinsi.
5	Suhardjanto dan Yulianingtyas	2011	<p><b>Variabel independen:</b> Ukuran daerah (size), jumlah SKPD, dan status daerah.</p> <p><b>Variabel kontrol:</b> Jumlah anggota DPRD dan lokasi pemerintah daerah.</p> <p><b>Variabel dependen:</b> Pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	Jumlah anggota DPRD berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan ukuran daerah (size), jumlah SKPD, status daerah dan lokasi pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah.



No	Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil
6	Puspita dan Martani	2011	<b>Variabel independen:</b> Ketergantungan daerah (DAU), ukuran Pemda, total pengungkapan, kompleksitas pemerintahan, kinerja daerah dan belanja daerah. <b>Variabel dependen:</b> Tingkat pengungkapan sukarela pada website Pemda	Variabel yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pada website Pemda adalah: ketergantungan daerah (DAU), ukuran Pemda, total pengungkapan dan kompleksitas pemerintahan. Sedangkan kinerja daerah dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada website Pemda.

### C. Penurunan Hipotesis

#### 1. Pengaruh kapasitas fiskal terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah

Penelitian Yon (2010) secara garis besar menemukan pengaruh signifikan dari komponen kapasitas fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi. Semakin besar kapasitas fiskal akan meningkatkan kemajuan teknologi, institusional (kelembagaan), dan idiologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada dari suatu daerah. Dengan demikian, logika yang sama dapat juga diterapkan pada pengungkapan yang dilakukan suatu Pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Darmastuti dan Setyaningrum (2011) menyatakan bahwa Kapasitas Fiksial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.

## **2. Pengaruh *legislative size* terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah**

Menurut Winarna dan Murni (2007), lembaga legislatif (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah guna mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah. Konsekuensinya, pemerintah daerah akan lebih bertanggung jawab dalam mengungkapkan informasi akuntansi sesuai dengan ketentuan SAP. Penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menemukan adanya pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Penelitian Darmastuti dan Setyaningrum (2011) menemukan bahwa legislature size tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H<sub>2</sub>: *Legislature Size* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.

## **3. Pengaruh diferensiasi fungsional terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merepresentasikan diferensiasi fungsional di pemerintahan Indonesia. Diferensiasi fungsional suatu daerah secara positif berhubungan dengan inovasi administratif (Damanpour, 1991; Patrick, 2007). SKPD merupakan suatu sarana dalam

berbagi ide informasi, dan inovasi (Damanpour, 1991). Oleh karena itu, keberadaan SKPD dalam suatu daerah gagasan-gagasan, informasi, dan inovasi yang lebih banyak akan memunculkan suatu pengungkapan. Sebagai konsekuensinya, akan terdapat tekanan untuk mengungkapkan sesuai dengan SAP (Suhardjanto, dkk, 2010). Pemerintah daerah dengan jumlah SKPD lebih banyak akan lebih menerapkan pengungkapan wajib sesuai dengan SAP daripada pemerintah daerah yang memiliki jumlah SKPD yang lebih sedikit.

Patrick (2007) menemukan bahwa Pemerintah daerah di Pennsylvania dengan tingkat diferensiasi fungsional yang lebih tinggi akan cenderung untuk lebih mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34* dibandingkan dengan yang tingkat diferensiasi fungsionalnya rendah. Pada Pemerintah daerah di Indonesia, fungsi departemen fungsional sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi. Pada Penelitian Darmastuti dan Setyaningrum (2011) mengatakan bahwa Diferensiasi Fungsional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Sedangkan Damanpour dalam Patrick (2007) berpendapat diferensiasi fungsional memfasilitasi pertukaran ide, informasi, dan inovasi. Semakin banyak jumlah entitas akuntansi pada suatu Pemerintah daerah, akan semakin besar pemenuhan pengungkapan termasuk pengungkapan atas belanja bantuan sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H<sub>3</sub>: Diferensiasi fungsional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4. Pengaruh spesialisasi pekerjaan terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah**

Patrick (2007) menemukan bahwa Pemerintah daerah yang memiliki administrator yang memiliki spesialisasi pekerjaan yang ditunjukkan dengan keterampilan dan pelatihan yang tinggi khususnya di bidang pelaporan keuangan/akuntansi akan lebih besar keinginannya untuk mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34* dibanding dengan Pemerintah daerah yang administratornya memiliki keterampilan dan pelatihan yang rendah. Kepala daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Dengan logika yang sama, Kepala daerah dan Wakilnya yang berlatar belakang pendidikan dibidang Ekonomi, termasuk Akuntansi, akan cenderung menyelenggarakan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang lebih baik termasuk pengungkapan atas belanja bantuan sosial. Maka, hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H<sub>4</sub>: Spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.

## **5. Pengaruh ukuran pemerintah daerah jaan terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah**

Ukuran daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007). Kabupaten/Kota dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto *et al.*, 2010). Oleh karena itu, pemerintah daerah tersebut akan menaruh perhatian yang lebih tinggi dalam pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi (Patrick, 2007; Cohen dan Kaimenakis, 2008). Kabupaten/Kota dengan aset yang lebih besar akan lebih mungkin untuk memenuhi SAP daripada pemerintah daerah dengan pendapatan daerah yang lebih kecil. Penelitian Patrick (2007) dan Cohen dan Kaimenakis (2008) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan. Puspita dan Martani (2011) juga menemukan bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan. Semakin besar ukuran Pemerintah daerah maka kinerja keuangan diharapkan akan semakin bagus. Salah satu perwujudan akuntabilitas adalah pelaporan kinerja organisasi melalui laporan keuangan (Mahmudi, 2007 dalam Sumarjo, 2010). Dengan begitu diharapkan bahwa semakin baiknya kinerja suatu Pemerintah daerah diimbangi dengan pelaporan keuangan yang baik, termasuk melakukan pengungkapan rinci an atas Belanja bantuan sosial.

H<sub>5</sub>: Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.

**6. Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah**

Umur administratif Pemerintah daerah, yaitu tahun dibentuknya suatu Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang pembentukan daerah tersebut, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pada penelitian Darmastuti dan Setyaningrum (2011) mengatakan bahwa Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Sedangkan Penelitian Lesmana (2010) membuktikan bahwa semakin lama suatu Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya, semakin besar tingkat pengungkapan yang disajikan oleh Pemerintah daerah tersebut. Semakin lama suatu Pemerintah daerah terbentuk, maka Pemerintah daerah tersebut semakin berpengalaman dan pengalaman tersebut menjadi keunggulan dari Pemerintah dalam menjalankan sistem administrasinya termasuk proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.

## **7. Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah**

Darmastuti dan Setyaningrum (2011) menemukan bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Sedangkan penelitian Lesmana (2010) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah daerah untuk tetap dapat menjalankan pemerintahannya tanpa adanya dana perimbangan dari Pemerintah pusat dan tanpa pembiayaan utang dari pihak luar. Hal ini dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki suatu Pemerintah daerah. Didalam PSAP No. 02 dijelaskan bahwa PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain yang sah yang sebagian besar dibayarkan oleh masyarakat. Tuntutan terhadap transparansi atas pengungkapan dan pelaporan keuangan juga semakin tinggi, termasuk dalam hal pengungkapan terhadap rincian belanja bantuan sosial. Maka, hipotesis penelitian yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

**H7: rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.**

## **8. Pengaruh pembiayaan utang terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah**

Lesmana (2010) menguji pengaruh kewajiban (hutang Pemerintah daerah) terhadap tingkat pengungkapan wajib. Penelitian tersebut tidak menemukan adanya pengaruh jumlah kewajiban dengan tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD). Akan tetapi, Patrick (2007) yang menguji hubungan variabel pembiayaan utang dengan determinasi dalam mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) 34 menemukan adanya pengaruh pembiayaan utang terhadap inovasi. Darmastuti dan Setyaningrum mengatakan juga bahwa Pembiayaan utang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Hal ini disebabkan karena organisasi dengan level pembiayaan utang yang tinggi akan diminta untuk menerbitkan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar yang Berlaku Umum.

Kepatuhan terhadap standar serta pengungkapan yang memadai adalah informasi penting bagi kreditor karena dengan informasi tersebut berguna untuk meyakinkan kreditor atas penilaian yang akurat dari kemampuan debitor dalam membayar kewajibannya. Selain itu, kreditor akan melakukan pengawasan kepada debitor untuk memastikan bahwa debitor dapat membayarkan kewajibannya di masa yang ditentukan. Maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

$H_8$ : Pembiayaan Utang berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.



## 9. Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah

Patrick (2007) mendefinisikan *intergovernmental revenue* sebagai transfer dana dari Pemerintah pusat dan Pemerintah federal kepada Pemerintah daerah. Dalam penelitiannya, Patrick (2007) menemukan adanya pengaruh negatif *intergovernmental revenue* terhadap inovasi. Sedangkan pada penelitian Darmastuti dan Setyaningrum (2011) mengatakn bahwa intergovernment berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Pada kenyataannya, Pemerintah daerah di Pennsylvania yang mempunyai tingkat *intergovernmental revenue* yang lebih rendah cenderung mengadopsi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) 34 daripada Pemerintah daerah dengan tingkat *intergovernmental revenue* yang lebih besar. Di Indonesia, Martani dan Liestiani (2010) mengadopsi *intergovernmental revenue* menjadi variabel tingkat ketergantungan, yang merupakan rasio dana alokasi umum pada dana perimbangan dari Pemerintah pusat. Penelitian Suhardjanto (2010) dalam Sumarjo (2010) menemukan adanya pengaruh positif *intergovernmental revenue* terhadap kesesuaian pengungkapan wajib Pemerintah daerah. Sumarjo (2010) memproksikan *intergovernmental revenue* dengan rasio dana perimbangan. Dalam hal pembelanjaan dana perimbangan, Pemerintah daerah diharuskan untuk melaksanakannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Meskipun Pemerintah pusat sebagai penyedia dana perimbangan tidak secara langsung membutuhkan pelaporan keuangan dari Pemerintah daerah, tapi Pemerintah pusat akan meminta suatu bentuk akuntabilitas dari Pemerintah daerah

(Patrick, 2007). Pemerintah daerah dapat melaksanakan akuntabilitasnya dengan melakukan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang lengkap, termasuk pengungkapan rincian atas belanja bantuan sosial. Dari penjelasan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H<sub>9</sub>: *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **10. Pengaruh jumlah penduduk daerah terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah**

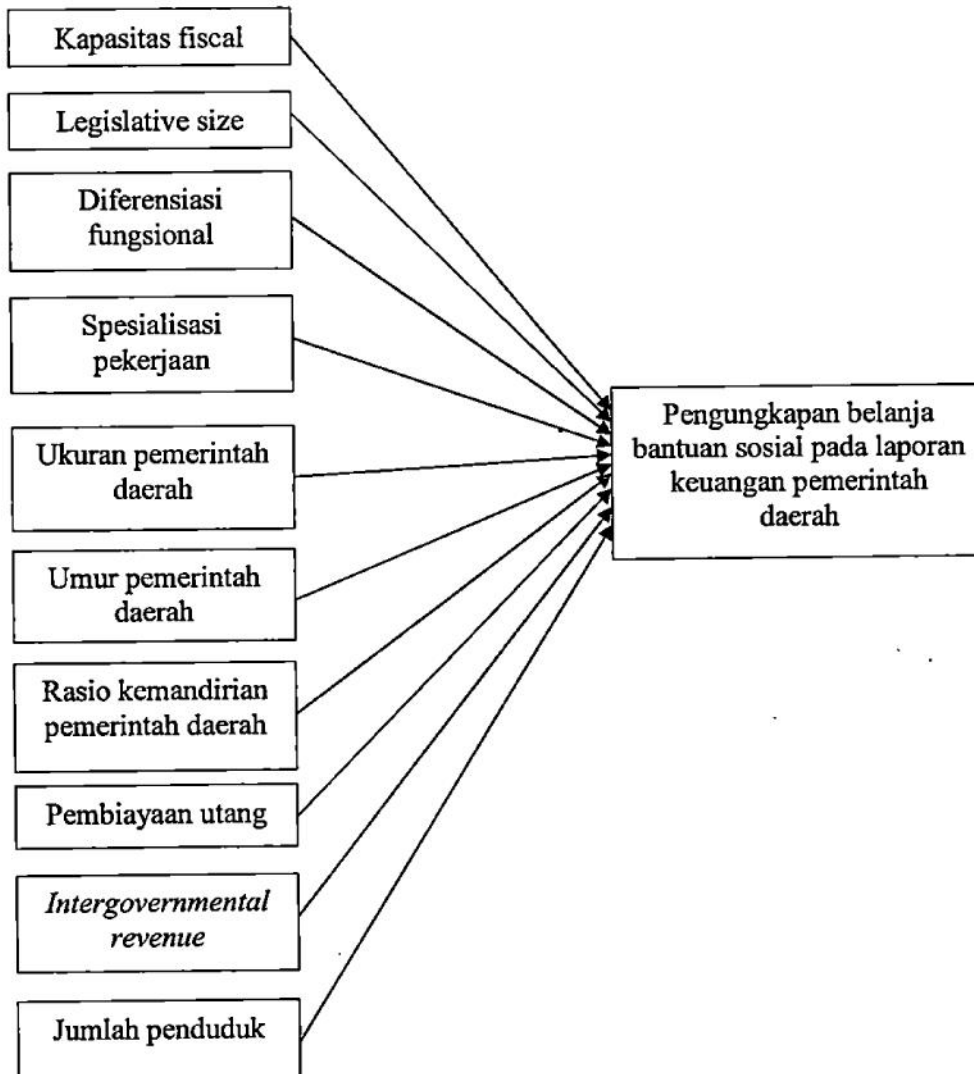
Liestiani (2008) menemukan bahwa jumlah penduduk berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Ingram (1984) dan Robbins dan Austin (1986) juga menemukan hubungan yang positif walaupun tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintah. Semakin kompleks pemerintahan maka semakin besar pengungkapan yang harus mereka lakukan.

H<sub>10</sub>: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **D. Model Penelitian**

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang terlihat pada skema ini yang menggambarkan mengenai pengaruh kapasitas fiskal, legislative size, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, rasio kemandirian pemerintah daerah,

pembiayaan utang dan *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah.



Gambar 2.1.  
Model Penelitian